ANGIN KENCANG TERJANG TEMPEL DAN PAKEM

Wilayah Kapanewon Turi Dilanda Hujan Es

KR-Istimewa

Petugas bersama warga saat mengevakuasi pohon yang tumbang.

TURI (KR) - Hujan es kembali terjadi di beberapa wilayah di Kapanewonan Turi. Selain itu juga ada angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang di jalan sehingga sempat mengganggu akses jalan. Namun dalam kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Makwan STp MT menjelaskan, hujan terjadi di wilayah Sleman mulai siang. Cuaca tersebut menimbulkan hujan es di wilayah Kalurahan Girikerto dan Donokerto Turi.

"Kami mendapat laporan dari warga, bahwa di Girikerto dan Donokerto Turi terjadi hujan es. Tapi tidak menimbulkan kerusakan atau korban atas peristiwa itu," kata Makwan di kantornya, Rabu (3/3).

Di samping hujan es, pohon kokosan diameter 50 cm tumbang melintang di jalan Dusun Pancoh RT 1 RW 11 Girikerto Turi. Akibatnya akses jalan di sekitarnya sempat tertutup. "Petugas dan relawan langsung menuju TKP untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Sehingga jalan kembali bisa dilalui oleh masyarakat," ujarnya.

Menurut Makwan, kejadian hujan es di Turi sebenarnya tidak hanya kemarin saja. Pada Selasa (2/3) juga terjadi hujan es di Bangunkerto. Selain itu juga angin kencang menerjang wilayah Padukuhan Bangunsari Bangunkerto Turi, Lumbungrejo Tempel dan Hargobinangun Pakem. Akibatnya beberapa pohon tumbang di jalan maupun menimpa rumah warga. Namun peristiwa itu tidak ada korban jiwa.

"Ada satu rumah warga yang tertimpa pohon. Tapi ada juga atap rumah warga yang beterbangan karena tertiup angin kencang. Kemarin petugas dibantu warga mengevakuasi pohon yang tumbang," ujarnya.

Untuk itu, Makwan mengimbau kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaannya pada musim penghujan ini. Ancaman bencana alam seperti angin kencang, banjir maupun tanah longsor masih berpotensi bisa terjadi di wilayah Sleman.

"Masyarakat harus waspada kalau di sekitar rumahnya ada pohon atau berada di perbukitan. Ancaman bencana itu bisa terjadi kapan saja, tanpa bisa diprediksi. Makanya kita harus meningkatkan kewaspadaan," jelas Makwan. **(Sni)-f**

Vaksinasi Tahap 2 Ditargetkan 175.000 Penerima

SLEMAN (KR) - Dinas Kesehatan Sleman menargetkan 175.000 orang yang akan menerima program vaksinasi tahap 2. Pemberian vaksinasi ini diperuntukkan pekerja maupun pelayan publik. Diperkirakan pemberian vaksinasi tahap 2 akan selesai pada April 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr Joko Hastaryo MKes mengatakan, pemberian vaksin tahap 2 ini diperuntukkan pekerja maupun pelayan publik seperti, PNS, wartawan, pelaku wisata, UMKM dan lainnya. Untuk pemberian vaksinasi tahap 2 ini sudah dilaksanakan minggu kemarin.

"Untuk vaksinasi tahap pertama itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tahap dua ini bagi pelayan maupun pekerja publik yang ada di Kabupaten Sleman," kata Joko Hastaryo di kantornya, Rabu (3/3).

Dalam vaksinasi tahap 2 ini, ditargetkan sekitar 175.000 penerima. Untuk saat ini sudah ada 52.000 pekerja layanan publik yang terdaftar. Sedangkan untuk lanjut usia (lansia), ditargetkan 120.000 orang. Program vaksinasi tahap 2 ini ditargetan akan selesai April 2021 mendatang. "Kami optimis ini bisa tercapai karena antusias pekerja publik untuk mendapat vaksinasi cukup tinggi," ujarnya.

Untuk pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini rencananya dibagi menjadi beberapa termin. Namun hal itu akan disesuaikan dengan ketersediaan atau penerimaan vaksinasi dari pemerintah. "Rencananya kami bagi tiga termin untuk pelaksanaan vaksinasi tahap 2. Tapi nanti akan kami lihat dulu karena tergantung ketersediaan vaksin. Makanya nanti akan kami atur jadwalnya agar semua berjalan dengan baik," paparnya.

Disinggung tentang pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, Joko menuturkan, ada 15.874 tenaga kesehatan yang terdaftar untuk menerima vaksin. Untuk kedatangannya sekitar 97 persen dari total tenaga kesehatan yang terdaftar. "Untuk pemberian vaksin dosis pertama hanya 89 persen dan dosis kedua 82 persen. Ada beberapa penyebab tidak bisa divaksin pada tahap pertama yaitu karena tensi darah tinggi, komorbit, penyitas, lansia, menyusui dan lainnya," pungkasnya. **(Sni)-f**

Sistem Bioflok Dongkrak Pendapatan Petani Ikan

SLEMAN (KR) - Bupati Kustini bersama Wabup Danang Maharsa melakukan panen ikan budidaya sistem bioflok di Kampung Mina Padi Samberembe, Rabu (3/3). Teknologi budidaya ikan sistem bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dalam budidaya melalui penyeimbangan karbon dan nitrogen dalam sistem budidaya.

KR-Istimewa

Bupati Kustini, Wabup Danang dan Kepala DP3 Heru Saptono memanen lele.

Menurut Bupati, program budidaya ikan sistem bioflok cukup signifikan untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Sleman. Sistem bioflok memiliki padat tebar tinggi sekitar 500 ekor permeter kubik, sedangkan kolam biasa sekitar 200 hingga 250 ekor per meter kubik.

"Hal ini jelas meningkatkan keuntungan, terbukti untuk 1 kali musim panen bioflok sekitar Rp 6 juta selama 3 bulan atau 1 siklus panen dibandingkan dengan cara konvensional yang menghasilkan sekitar Rp 2,4 juta hingga Rp 3 juta," ungkapnya.

Berbagai teknologi telah dikembangkan di Sleman, menurut Bupati dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan.

"Untuk teknologi yang kita panen saat ini adalah teknologi bioflok untuk ikan lele. Bioflok di Kabupaten Sleman ada 6 lokasi pengembangan yaitu di Kapanewon Pakem, Prambanan, Sleman dan Depok," tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Heru Saptono menambahkan, keunggulan teknologi bioflok ini adalah hemat air, tidak berbau, sistem aerasinya membuat kondisi air menjadi ideal untuk pertumbuhan bakteri sebagai sumber makanan bagi ikan. . **(Has)-f**

SIAPKAN SANKSI HINGGA PEMECATAN

Polda Larang Anggota Keluyuran Malam

SLEMAN (KR) - Polda DIY akan mengambil tindakan tegas bagi anggotanya yang keluyuran ke tempat hiburan malam. Apalagi, jika sampai kedapatan meminum minuman keras atau membuat keributan. Sanksi hingga pemecatan, akan diberikan jika perintah yang datang dari Mabes Polri itu dilanggar.

KR-Wahyu Priyanti

Brigjen Pol R Slamet Santoso

"Anggota yang melanggar akan kita tindak tegas karena instruksi sudah ada, bahkan mungkin bisa sampai pemecatan," tegas Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santoso SIK di kantornya, Rabu (3/3).

Menurut Wakapolda, perintah atau larangan terkait hal itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja, pascakejadian penembakan oleh oknum anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat yang menewaskan tiga orang di kafe di Cengkareng dalam kondisi mabuk, larangan itu kembali ditekankan oleh pimpinan. Dengan adanya penekanan itu, Polda DIY kembali mengingatkan anggotanya melalui masing-masing Kasatker atau Kasatwil. "Fungsi pengawasan oleh Propam sesuai visi misi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah ditingkatkan," jelasnya.

Brigjen Slamet juga membenarkan jika saat ini Propam Polda sedang menyelidiki kasus seorang oknum polisi yang diduga keluyuran di tempat hiburan malam dan membuat keributan.

"Itu masih didalami seperti apa dan di Propam pasti ada laporannya. Kami juga mengimbau agar masyarakat melaporkan jika melihat anggota keluyuran di tempat hiburan malam. Jangan takut, karena identitas pelapor kami rahasiakan," pungkasnya. **(Ayu)-f**

Pemda Perlu Percepat Vaksinasi Massal

SLEMAN (KR) - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu mempercepat program vaksinasi massal. Program yang menyasar seluruh masyarakat pada umumnya bisa dilakukan bertahap dan beriringan dengan vaksin kelompok tertentu yang kini terus berlangsung (tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia). Tujuannya, agar herd immunity atau kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk.

KR-Istimewa

Subardi

"Saya usulkan vaksinasi massal dipercepat sehingga target kekebalan kelompok juga cepat terbentuk. Kalau menunggu beberapa bulan lagi, khawatir pembentukan *herd immunity* terlalu lama dan penularan akan terus berlangsung," kata Mbah Bardi, sapaan akrabnya saat ditemui di Sleman, Rabu (3/3).

Subardi mengusulkan manajemen vaksinasi massal bisa dilakukan dengan *self assessment system* atau inisiatif masyarakat untuk mendaftar vaksin. Sistem yang diterapkan dalam mekanisme pelaporan pajak ini diyakini efektif mendorong masyarakat menyukseskan percepatan vaksin massal. Selain itu, cara seperti ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu vaksin untuk kelompok prioritas selesai karena masyarakat bisa mengajukan waktunya sendiri.

"Bisa saja dengan pola *self assessment system* untuk membangun kesadaran kolektif. Biarkan masyarakat berinisiatif untuk mendaftar vaksin. Tentunya pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapannya dan alokasi vaksinnya," tambahnya.

Usulan ini, lanjut Subardi didasarkan pada semangat gotong royong bahwa vaksinasi ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi ada peran aktif masyarakat. "Saya optimistis percepatan vaksin massal tidak harus menunggu terlalu lama, apalagi diwacanakan baru digelar pada pertengahan tahun," tutur Ketua DPW NasDem DIY itu.

Terkait vaksin mandiri, Subardi turut mendukung langkah pemerintah yang saat ini sedang merumuskan aturan vaksin mandiri. Hanya saja, pemerintah tetap fokus dalam mempercepat vaksin saat ini. **(*)-f**